

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Peran

##### 1. Pengertian Peran

Peran merupakan adalah kinerja dari hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno peran adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah efektifitas dan efisiensi, otoritas/wewenang, dan disiplin.<sup>9</sup>

Penilaian peran (*performance appraisal*) adalah suatu proses yang memungkinkan organisasi mengetahui, mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja anggota-anggotanya secara tepat dan akurat. Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai oleh seseorang, organisasi ataupun perusahaan. Tujuan penelitian kinerja adalah sebagai alat

---

<sup>9</sup> Edison, E. “*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, Bandung 2019 hlm 34

*diagnostic* dan proses penilai terhadap pengembangan individu, tim dan organisasi.<sup>10</sup>

## 2. Peran Bank Indonesia

Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar dapat dinilai melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan seperti kebijakan suku bunga acuan atau disebut dengan *BI-7 Day Reverse Repo Rate*. Bank Indonesia menciptakan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan baru yang berlaku efektif pada 19 Agustus 2016 menggantikan kebijakan lama yaitu *BI Rate*.

Bank sentral atau disebut Bank Indonesia memiliki arti penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro khususnya di bidang moneter. Bank Indonesia dalam pengertian umum adalah sebuah Lembaga yang disertai tugas untuk mengontrol sistem keuangan dan perbankan<sup>11</sup> keuangan, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.

<sup>10</sup> Bintoro. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Gava Media, Yogyakarta.

<sup>11</sup> <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx>, diakses 22 Juni 2022

<sup>12</sup> Ichwani, Tia., dkk. (2017). *Analisis Kinerja Bank Indonesia Sebagai Stabilisator Inflasi dan Kurs Rupiah di Bidang Moneter*. *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 4 No. 3 250-265

- b. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
- c. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul resiko potensial yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan resiko yang bersifat menular sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistematis. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain, dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.
- d. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas.

Pengertian bank pada dasarnya sama dimana Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana tersebut, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usaha perbankan, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Dengan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan moneter,

sehingga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter (pemerintah) dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan moneter.<sup>13</sup>

## B. Nilai Tukar

### 1. Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar (*kurs*) merupakan suatu mata uang yang didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Menurut priyono nilai tukar merupakan pertukan antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga mata uang tersebut. Nilai tukar biasanya mengalami perubahan, perubahannya dapat berupa defresiasi maupun apresiasi. Defresiasi mata uang rupiah terhadap dolar artinta suatu penurunan harga dolar terhadap rupiah. Depresiasi mata uang negara membuat harga barang-barang domestik menjadi lebih murah bagi pihak luar negeri. Sedangkan apresiasi mata uang rupiah terhadap dolar adalah kenaikan harga mata uang rupiah terhadap dolar. Menurut Mchtra C., dan Fakhruddin “guna menjaga kestabilan perekonomian suatu negara, maka kebijakan monoter yang mengarah pada kestabilan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing menjadin sangat diperlukan”. Menurut Eiteman, Moffet, dan stonehill dalam Tia Ichwani, Dkk. Sistem atau rezim yang mengatur nilai tukar dibagi atas *fixed echange rate sistem* maupun *floating/flexible echange rate sistem*. Bila pemerintah suatu negara mengatur pada tingkat beberapa mata uangnya dapat diperdagangkan, maka sistem tersebut termasuk *fixed*

---

<sup>13</sup> Fatmah Watty Pelupessy, Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (Studi Cabang-Cabang Pt. Bank Maluku), (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Vol 3 No 1 Juli 2020), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ambon. Hlm 197

atau *manage exchange rate*. Sedangkan apabila pemerintah yang bersangkutan tidak mengintervensi penilaian mata uangnya, maka sistem tersebut diklarifikasikan sebagai *floating/flexible exchange rate*. Indonesia pernah menggunakan *fixed exchange rate sistem* pada tahun 1964-1978, kemudian berganti menjadi *floating exchange rate sistem* walaupun tetap melakukan intervensi terhadap pasar faldas bila diperlukan. Pada *floating exchange rate sistem*. Nilai kurs akan berfluktuasi mengikuti permintaan dan penawaran pasar. Semakin menguat kurs rupiah sampai batas tertentu berarti menggabarkan kinerja dipasar uang semakin menunjukan perbaikan. Sebagai dampka meningkatnya laju inflasi maka nilai tukar domestik semakin melemah terhadap mata uang asing. Hal ini mengakibatkan menurunnya kinerja suatu perusahaan dan investasi di pasar modal menjadi berkurang.

Keseimbangan nilai tukar akan mengalami perubahan sepanjang waktu sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan mata uang tersebut akan berpengaruh pula pada fuktuasi nilai tukar mata uang tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai tukar, yaitu:

a. Inflasi

Perubahan tingkat tingkat inflasi relatif antara suatu negara dengan negara lainnya berpengaruh terhadap aktifitas perdagangan internasional. Perubahan aktivitas perdagangan internasional tersebut akan mempengaruhi kondisi pwrmintaan dan penawaran mata uang

tersebut. Hal ini kemudian berpengaruh pada nilai tukar mata uang negara tersebut. Apabila tingkat inflasi pada suatu negara tinggi, maka nilai mata uang lokal akan rendah, dan sebaliknya. Hal tersebut akan mengakibatkan kecenderungan untuk menjatuhkan nilai tukar mata uang lokal.

b. Kegiatan neraca pembayaran

Neraca pembayaran yang aktif adalah peningkatan permintaan dari pihak debitor asing, sehingga akan mampu meningkatkan nilai mata uang lokal. Sedangkan, pasifnya suatu saldo pembayaran, yang mana debitemnya dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing, maka akan menyebabkan penurunan nilai tukar terhadap mata uang nasional.

c. Perbedaan suku bunga diberbagai negara

Tingkat bunga adalah suatu harga dari uang yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga yang tinggi pada suatu negara akan turut mempengaruhi arus modal internasional. Perubahan tingkat suku bunga relatif antara suatu negara dengan negara lainya dapat berpengaruh terhadap investasi asing. Perubahan investasi asing inilah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut kemudiann berdampak pada fluktuasi nilai tukar mata uang negara tersebut.

d. Pengendalian permintaan

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah juga akan turut mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang. Berbagai contoh dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah dalam menghidarimasalah nilai tukar valuta asing dan juga perdagangan internasional, serta mengintervensi pasar uang.

e. Ekspektasi

Faktor lain yang mempengaruhi nilai tukar pada valuta asing adalah ekspektasi nilai tukar. Ekspektasi dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara karena ekspektasi tersebut didasarkan pada kemungkinan terjadinya perubahan tingkat suku bunga dan juga kondisi perekonomian suatu negara.

## 2. Sejarah Perkembangan

Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia Sejak tahun 1970, negara Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu:

a. Sistem kurs tetap (1970-1978) Sesuai dengan Undang-Undang No.32

Tahun 1964, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi Rp. 250/US\$, sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US\$. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing.

b. Sistem mengambang terkendali (1978 - 1997) Pada masa ini, nilai tukar rupiah didasarkan pada sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies). Kebijakan ini diterapkan bersama dengan dilakukannya

devaluasi rupiah pada tahun 1978. Dengan sistem ini, pemerintah menetapkan kurs indikasi (pembatas) dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau bawah dari spread.

- c. Sistem kurs mengambang (14 Agustus 1997-sekarang) Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US\$ semakin melemah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi (sistem nilai tukar mengambang terkendali) dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*) pada tanggal 14 Agustus 1997. Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri.

### 3. Sistem Nilai Tukar

Sistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.<sup>14</sup> Terdapat tiga sistem nilai tukar yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai sistem nilai tukar yang berlaku yaitu:

- a. Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchanged Rate*)

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

- b. Sistem Nilai Tukar Mengambang (*Floating Exchange Rate*)
- c. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchange Rate*).

Sebelum menetapkan sistem nilai tukar yang akan diberlakukan, pemerintah mendapat masukan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia mengajukan usulan tentang sistem nilai tukar yang akan diberlakukan setelah melakukan kajian tentang situasi dan kondisi perekonomian nasional dan internasional secara menyeluruh.

Setelah pemerintah menetapkan sistem nilai tukar yang akan digunakan, pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar. Kewenangan yang dimiliki oleh otoritas moneter dalam melaksanakan sistem nilai tukar antara lain adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### **4. Faktor-faktor penyebab perubahan nilai tukar**

Nilai tukar rupiah dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah faktor yang secara langsung maupun faktor yang tidak langsung. Faktor penyebab secara langsung pada permintaan dan penawaran valas dipengaruhi oleh permintaan akan impor barang atau jasa yang memerlukan dolar maupun valuta asing lainnya, serta ekspor modal dari dalam negeri ke luar negeri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-S1/banklembagakeuangan-1/bank-indonesia> diakses pada tanggal 28 Juni 2023, Pukul 02.30 WIT

<sup>16</sup> Imamul Arifin, Giana Hadi W., *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: PT setia Purna Inves, 2019), hlm. 84

Kemudian penawaran terhadap valas akan dipengaruhi oleh ekspor barang dan jasa yang menghasilkan dollar atau valuta asing lainnya, serta impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap nilai tukar rupiah yaitu posisi neraca pembayaran, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pendapatan nasional, kebijakan moneter, serta ekspektasi dan spekulasi.<sup>17</sup>

- a. dalam sistem nilai tukar tetap otoritas moneter mempunyai kewenangan untuk melakukan devaluasi atau revaluasi mata uang domestik terhadap mata uang asing
- b. dalam sistem nilai tukar mengambang otoritas moneter mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi pasar dalam mengendalikan nilai mata uang domestik
- c. dalam nilai tukar mengambang terkendali otoritas moneter mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.

Secara garis besar sistem nilai tukar dapat dibagi menjadi dua sistem, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchanged rate*), sistem dimana nilai tukar mata uang domestik ditetapkan pada tingkat tertentu terhadap nilai mata uang asing;
- b. Sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*), system dimana nilai tukar mata uang domestik diambangkan terhadap nilai

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 84.

<sup>18</sup> Lianah, Sistem Moneter Internasional Modul 9, Universitas Mercu Buana, 2008

mata uang asing, atau sesuai dengan pergerakan pasar dimana terjadinya kurs mata uang berdasarkan pada permintaan dan penawaran mata uang asing.

Kedua sistem tersebut di atas diimplementasikan dengan berbagai variasi, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Sistem nilai tukar tetap permanent (*Permanently Fixed Exchange Rate*);
- b. Sistem nilai tukar mengambang murni (*Absolutely Floating Exchange Rate*);
- c. Sistem nilai tukar tetap terbatas (*Fixed Permanently Exchange Rate*);
- d. Sistem nilai tukar tetap yang dapat disesuaikan (*Adjustable Fixed Exchange Rate*);
- e. Sistem nilai tukar merayap (*Crawling Peg System*);
- f. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (*Managed Floating Exchange Rate*)

### **C. Kebijakan Moneter**

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang. (a) Pertama, persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain

---

<sup>19</sup> *Ibid*

(misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. (b) Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (*interest*) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang.<sup>20</sup>

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: (a) Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*). Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*). (b) Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*). Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).<sup>21</sup>

Menurut standar akuntansi pemerintah (SAP), aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan, dan dapat

---

<sup>20</sup> Karim, Adiwarmanto A., 2001. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Gema Insani Press

<sup>21</sup> Rahardja, 2005 *Pengantar Ekonomi*, Mandala Manurung: Jakarta

diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.<sup>22</sup>

#### **D. Tujuan Kebijakan Moneter**

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara

---

<sup>22</sup> Dety Aryani Relubun, Muhammad H. Holle, Maimuna Toatubun, Fenomena Kinerja Industri Perbankan Syariah Di Maluku, (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika (Jbmi) –Vol 18 No. Iii, 2022), Institut Agama Islam Negeri Ambon

lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>23</sup>

#### E. Konsep Moneter Dalam Islam

Pada konsep ini ekonomi syariah memandang uang sebagai alat tukar, hal itu merepresentasikan kekuatan daya beli (*purchasing power*) yang dianggap sebagai satu-satunya fungsi uang. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi syariah digunakan tingkat pengembalian syariah dari kegiatan ekonomi sebagai *instrumen intermediary*. Dalam pandangan kebijakan moneter syariah, sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Menurut Chapra, mekanisme instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup enam elemen yaitu:<sup>24</sup>

- a. Target Pertumbuhan. Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang sesuai dengan sasaran ekonomi nasional.

---

<sup>23</sup> ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\\_moneter](http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter). Di Akses pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023, Pukul 02.00 WIT

<sup>24</sup> Umer M. Chapra, Terj. Towards a Just Monetary System (Jakarta: Gema Insani Press, 2019)

- b. Saham Publik terhadap Deposito Atas Unjuk/Uang Giral (Public Share of Demand Deposit) Dalam jumlah tertentu demand deposit bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan.
- c. Cadangan Wajib Resmi (Statutory Reserve Requirement) Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Statutory reserve requirements membantu memberikan jaminan atas deposit sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, bank sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini.
- d. Pembatasan Kredit (Credit Ceilings) Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial.
- e. Alokasi Kredit yang Berorientasi pada Nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi 14 produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi risiko dan biaya yang harus ditanggung bank.

Dalam pandangan ekonomi Islam, nilai tukar rupiah atau mata uang suatu negara dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi. Berikut adalah beberapa pandangan dan prinsip yang relevan terkait dengan nilai tukar rupiah dalam konteks ekonomi Islam :

- a. Stabilitas Nilai Tukar: Dalam ekonomi Islam, stabilitas nilai tukar dianggap penting untuk mendorong keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari fluktuasi yang tidak terduga. Volatilitas yang tinggi dalam nilai tukar dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan ketidakpastian yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi tujuan yang diinginkan dalam pandangan ekonomi Islam.
- b. Larangan Riba: Prinsip utama ekonomi Islam adalah larangan riba atau bunga. Dalam konteks nilai tukar, ini berarti bahwa nilai tukar rupiah tidak boleh dipengaruhi oleh transaksi ribawi (berbasis bunga). Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya perlu memastikan bahwa kebijakan moneter dan intervensi dipasar valuta asing tidak melibatkan instrumen bunga ribawi, yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.
- c. Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip keadilan dan keseimbangan juga relevan dalam pandangan ekonomi Islam terhadap nilai tukar rupiah. Bank Indonesia dan pemerintah perlu memastikan bahwa nilai tukar yang ditetapkan dan intervensi dipasar valuta asing dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan efeknya terhadap sektor riil dan masyarakat secara keseluruhan.

d. Efisiensi dan Dukungan terhadap Ekonomi Riil: Dalam pandangan ekonomi Islam, efisiensi dalam penggunaan sumber daya sangat dihargai. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tidak hanya berfokus pada sektor keuangan, tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi riil. Dukungan terhadap sektor produktif dan usaha mikro, kecil, dan menengah dianggap penting dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam keseluruhan, pandangan ekonomi Islam terhadap nilai tukar rupiah menekankan pentingnya stabilitas nilai tukar, larangan riba, keadilan, keseimbangan, efisiensi, dan dukungan terhadap ekonomi riil. Dalam melaksanakan peran mereka, Bank Indonesia dan pemerintah perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil peneliti terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui akan dari sisi mana penulis membuat karya ilmiah. Selanjutnya akan diketahui perbedaan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema peneliti, tetapi ada beberapa penelitian yang memperbincangkan terkait dengan peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yunan Hendra Permana, Nur'aeni, Setiawan (Journal Dimamu. Vol. 1, No. 2. 2022). yang berjudul “Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan Peran Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan ekonomi dan jumlah uang beredar melalui Kebijakan Moneter. Objek Penelitian ini adalah bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Adapun Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang diperoleh berupa data primer dengan observasi lapangan dan wawancara yaitu dengan pengamatan secara langsung di lapangan dan proses tanya jawab dengan narasumber untuk tukar informasi serta ide dalam mendapatkan informasi dan menggunakan data sekunder dengan mendapatkan informasi melalui website resmi dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme dan peran yang dilakukan Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan ekonomi dan Jumlah Uang Beredar melalui Kebijakan Moneter adalah pertama, melalui suku bunga BI 7DRR (Bank Indonesia 7 Day Repo Rate) dan Operasi Pasar Terbuka, Kedua, dengan menggunakan instrumen Kebijakan Makroprudensial dan Kebijakan Diskonto.<sup>25</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah dan Saparuddin Siregar (Journal Misykat al-Anwar-Kajian Islam dan Masyarakat. Vol. 3, No. 1.

---

<sup>25</sup> Yunan Hendra Permana, Nur'aeni, Setiawan, “Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter”, Perbankan Syariah, Universitas Ma'soem, Indonesia

2020). yang berjudul “Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pasar keuangan syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada Asisten Manajer Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa perkembangan pasar keuangan syariah meningkat dari tahun 2017. Bank Indonesia mempunyai kebijakan makroprudensial yaitu kebijakan tentang Stabilitas Sistem Keuangan. Dimana, kebijakan tersebut mampu mengendalikan resiko yang ada dalam perkembangan pasar keuangan syariah.<sup>26</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Huda (Journal Salimiyah. Vol. 3, No. 1. 2022). yang berjudul “Peran Bank Indonesia dalam Implementasi Kebijakan Moneter Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kebijakan moneter pada moneter konvensional yang menggunakan lembaga perbankan dan kebijakan moneter Islam yang tidak selalu menggunakan Lembaga perbankan sebagai otoritas yang

---

<sup>26</sup> Siti Fatimah, 2019 “Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

menentukan kebijakan moneternya dan implementasi yang digunakan di era sekarang. Penulisan ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan sehingga kajian di fokuskan pada bahan kepustakaan dengan menelusuri literatur terkait. Data data dalam penelitian ini merupakan data teoritik yang diambil dari literatur pustaka diolah dengan menyadur, mengutip dan menggunakan penerapan dan berbagai sumber rujukan dalam artikel ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua jenis kebijakan moneter. Artinya, kebijakan moneter diperpanjang adalah kebijakan moneter yang digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi, misalnya dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang dirancang untuk menunda kegiatan ekonomi, misalnya dengan mengurangi jumlah uang beredar. Implementasi kebijakan moneter menjadi penting karena berkaitan dengan anggapan bahwa uang yang beredar berkaitan erat dengan sektor barang dan jasa atau sektor bisnis. Dengan mengelola jumlah uang yang beredar di masyarakat, Anda dapat mempengaruhi variabel ekonomi dunia nyata seperti tingkat harga, investasi, dan produksi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Abdianti dkk (Journal Training Manajemen Badan Ekonomi. Vol. 1, No. 3. 2023). yang berjudul “Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan dapat mengkaji dampak kebijakan moneter Bank Indonesia, seperti perubahan suku bunga atau kebijakan lainnya, terhadap distribusi keadilan ekonomi dalam masyarakat dalam konteks ekonomi Islam. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yang

kemudian mengkaji dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang terkumpul untuk mendeskripsikan masalah kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam mempunyai kebijakan moneter berbeda dengan ekonomi lainnya. Praktik moneter yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu standar bimetal dengan emas dan perak (dinar dan dirham) dalam peredaran konstan. Kebijakan moneter yaitu kebijakan dimana bank sentral mengatur jumlah uang yang menyebar dan persebaran uang untuk mencapai keseimbangan suatu domestik (pertumbuhan ekonomi yang laju, stabilitas harga, pembangunan yang adil) dan keseimbangan eksternal (neraca pembayaran). Kebijakan moneter dalam ekonomi syariah juga harus terbebas dari pengaruh suku Bunga dan riba. Dalam syariah, riba ini juga termasuk bunga bank yang dilarang keras dalam Al-Qur'an. Pengelolaan mata uang dalam ekonomi syariah ini berdasarkan pada prinsip prinsip bagi hasil. Alat kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu hukum Syariah. Implementasi dari semua alat kebijakan moneter konvensional dan barang berharga juga mengandung komponen. riba dan bunga karena itu, alat konvensional memasukkan berbagai unsur bunga dan riba yang tidak bisa digunakan untuk menerapkan kebijakan moneter syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nauval Tamam & Muslikhati (Jurnal Iqtishodia Ekonomi Syariah. Vol. 4, No. 1. 2019). yang berjudul “Analisis Korelasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini bertujuan bahwa variabel nilai tukar Rupiah dan Dolar Amerika Serikat

dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak ada hubungan kausalitas, tetapi terdapat hubungan satu arah. Variabel Independen yakni nilai tukar Rupiah dan Dolar Amerika Serikat menghasilkan hubungan yang signifikan dan berkorelasi terhadap variabel dependen yakni pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemegang kebijakan moneter bisa menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan Dolar Amerika Serikat agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terjadi penurunan. Penelitian selanjutnya diharapkan kedepannya dapat lebih fokus dan terperinci dalam menjelaskan tentang tinjauan perspektif Islam terhadap kausalitas antara nilai tukar Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkaya sumber yang relevan dan menambahkan variabel lain serta dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian-penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran BI (Bank Indonesia) dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui penelitian ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implikasi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam mengelola nilai tukar dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi Islam.